



**LAPORAN KINERJA
BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2020**

**Disusun :
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, dan hidayahNya sehingga penyusunan “Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2020 ini dapat terselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan. LKjIP ini memuat tentang Tujuan dan Sasaran serta Capaian Kinerja Pembangunan Kabupaten Sidoarjo yang telah diimplementasikan ke dalam kebijakan program dan kegiatan dalam Rencana Strategis Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo selama 5 (lima) tahun sebagai acuan penyusunan Laporan Kinerja dan Anggaran dalam 1 (satu) tahun. Keselarasan kinerja RPJMD dan Renstra Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah melaksanakan Misi 2 RPJMD yaitu Meningkatnya perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi berbasis industri pengelolaan, pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM dan Koperasi serta pemberdayaan masyarakat. Adapun keselarasan sarannya adalah Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah dengan kualitas pelayanan pajak daerah yang prima.

Walaupun kinerja di tahun 2020 ada permasalahan yang cukup besar, yaitu Pandemi Covid-19, maka telah dilakukan penyesuaian target kinerja melalui Review Renstra BPPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021. Upaya optimal dengan komitmen bersama untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, maka permasalahan-permasalahan yang menjadi hambatan dalam pencapaian kinerja dapat teratasi sampai akhir tahun 2020. Capaian ini merupakan perwujudan konkrit dan tanggung jawab atas konsistensi pelaksanaan program kegiatan secara menyeluruh. Untuk itu disampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran pegawai di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo dan berharap kinerja di tahun yang akan datang harus lebih baik dan lebih berkualitas.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	v
IKHTISAR EKSEKUTIF	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang	1
a) Dasar Hukum	1
b) Tujuan Penyusunan	2
1.2. Gambaran Umum OPD	3
a) Struktur Organisasi	4
b) Tugas Pokok dan Fungsi	5
1.3. Aspek Strategis OPD	13
a) Sumber Daya Aparatur	13
b) Aset Yang Dimiliki	14
c) Isu Strategis Yang Dihadapi	16
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	18
2.1. Perencanaan Strategis	18
2.2. Rencana Kerja Tahunan	23
2.3. Perjanjian Kinerja	28
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	34
3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama	34
3.2. Capaian Kinerja Organisasi	34
a. Pengukuran Kinerja Jangka Menengah	34
b. Analisis Pencapaian Kinerja Jangka Menengah	35
i. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target	35
ii. Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya	35
c. Pengukuran Kinerja Tahunan	36
d. Analisis Pencapaian Kinerja Tahunan	37
i. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target	37
ii. Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya	39
iii. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah	40

iv. Perbandingan antara capaian kinerja dengan instansi sejenis	40
3.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja	41
a. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan	42
b. Solusi dan upaya perbaikan di tahun mendatang	44
3.4. Analisis Pencapaian Program dan Kegiatan Pendukung	45
3.5. Laporan Realisasi Anggaran	49
3.6. Pencapaian Kinerja dan Anggaran	50
3.7. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	51
a. Efektivitas dan Efisiensi	51
b. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	51
BAB IV : PENUTUP / SIMPULAN UMUM	52
PERNYATAAN TELAH DI REVIEW OLEH INSPEKTORAT	53

DAFTAR TABEL

1. Tabel kinerja BPPD	vi
2. Tabel capaian program dan kegiatan	vi
3. Tabel keterkaitan RPJMD Kabupaten Sidoarjo dengan Renstra BPPD	18
4. Tabel Matriks Renstra	19
5. Tabel Renja 2020	23
6. Tabel Perjanjian Kinerja	29
7. Tabel Anggaran Program / Kegiatan	33
8. Tabel capaian IKU tahun 2020	34
9. Tabel Pengukuran Kinerja Jangka Menengah	34
10. Tabel Perbandingan antara capaian kinerja dengan target	35
11. Tabel Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya	35
12. Tabel Pengukuran Kinerja Tahunan	36
13. Tabel Perbandingan antara capaian kinerja dengan target	37
14. Tabel Penerimaan Pajak Daerah	38
15. Tabel Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya	39
16. Tabel Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah	40
17. Tabel Analisis Keberhasilan dan Kegagalan	41
18. Tabel Pengukuran Keberhasilan Kinerja Tahunan OPD	43
19. Tabel Analisis Pencapaian Program dan Kegiatan Pendukung	45
20. Tabel Laporan Realisasi Anggaran	49
21. Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran	50
22. Tabel Efektivitas dan Efisiensi	51

DAFTAR GRAFIK

1. Grafik Data SDM berdasarkan kualifikasi pendidikan dan golongan	14
2. Grafik capaian kinerja tujuan	35
3. Grafik perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya	36
4. Grafik perbandingan antara capaian kinerja dengan target	37

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020, disampaikan sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	% Capaian	Kategori
1	Meningkatnya penerimaan Pajak Daerah dengan kualitas pelayanan prima	Nilai SKM terhadap layanan pajak daerah	109,41%	Sangat berhasil
		Prosentase keluhan WP yang diselesaikan sesuai waktu tanggap	-	-
		Prosentase peningkatan Penerimaan pajak daerah	109,40%	Sangat berhasil
		Prosentase Realisasi Piutang	-	-

KETERANGAN :

No.	% CAPAIAN	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat berhasil
2	90% s.d kurang dari 100%	Berhasil
3	75% s.d kurang dari 90%	Cukup
4	Kurang dari 75%	Kurang

- Sasaran tersebut di atas didukung oleh 4 Program, dan 16 Kegiatan, rincian Indikator Kinerja sebagai berikut :

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	% Capaian	Kategori
	Program pelayanan Kesekretariatan	Tingkat kepuasan aparatur PD terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	Berhasil
	Penyediaan barang/jasa perkantoran	Jumlah surat keluar masuk yang dikelola	131,53 %	Sangat berhasil
		Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar	100 %	Berhasil
		Jumlah BBM yang disediakan	100 %	Berhasil
		Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya	106,67 %	Sangat berhasil
		Jumlah jamuan rapat/tamu yang	52.14 %	Kurang

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	% Capaian	Kategori
		disediakan		
		Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar	100 %	Berhasil
		Jumlah buku bahan bacaan dan koran yang tersedia	96,43 %	Berhasil
		Jumlah komponen listrik /penerangan yang tersedia	100 %	Berhasil
		Jumlah alat tulis kantor dan cetak penggandaan yang tersedia	100 %	Berhasil
	Kegiatan kedinasan dalam daerah, luar daerah dan luar negeri	Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti	100%	Berhasil
	Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung / kantor / rumah dinas/jabatan yang diadakan	90,82 %	Berhasil
	Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah luas gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang dipelihara	100 %	Berhasil
		Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	152,94 %	Sangat berhasil
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang dipelihara	116,43 %	Sangat berhasil
	Pengadaan pakaian dinas dan kelengkapan aparatur	Jumlah pakaian dinas/kerja dan kelengkapan aparatur yang tersedia	-	-
		Jumlah pakaian hari-hari tertentu yang tersedia	-	-
	Monitoring dan evaluasi pelaporan kinerja PD	a. Jumlah dokumen Monev PD yang disusun	100 %	Berhasil
		b. Jumlah Dokumen SKM yang disusun	100 %	Berhasil
		c. Jumlah dokumen Laporan kinerja yang disusun	100 %	Berhasil
	Penyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan PD yang tersusun	100 %	Berhasil

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	% Capaian	Kategori
	Program Pendataan, Peningkatan Dan Pengembangan Pajak Daerah	Prosentase Pertumbuhan Obyek Pajak Daerah	119,5 %	Sangat berhasil
	Pendataan Dan Ekstensifikasi Pajak Daerah	Jumlah obyek pajak yang dilakukan penilaian individu atas bangunan PBB	100 %	Berhasil
		Jumlah obyek pajak dan WP baru yang didata	117,72 %	Sangat berhasil
	Pengembangan Dan Intensifikasi Pajak Daerah	Jumlah obyek pajak yang dilakukan penilaian massal	99,3 %	Berhasil
	Pengolahan Data Dan Informasi Pajak Daerah	Jumlah data informasi yang diperbarui	100 %	Berhasil
		Jumlah dan jenis data pajak daerah yang diolah	100 %	berhasil
	Program Penetapan Pajak Daerah	Prosentase jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang sesuai ketentuan	123,44 %	Sangat berhasil
	Verifikasi penetapan pajak daerah	Jumlah verifikasi ketetapan pajak daerah	101,93 %	Sangat berhasil
		Jumlah surat pemberitahuan dan surat ketetapan yang disampaikan ke WP	101,00 %	Sangat berhasil
	Penyelesaian Piutang Pajak Daerah	Prosentase jumlah tunggakan yang ada obyek pajaknya	125,62 %	Sangat berhasil
		Prosentase jumlah tunggakan yang tidak ada obyek pajaknya	119,88 %	Sangat berhasil
	Pemeriksaan pajak daerah.	Jumlah WP yang dilakukan pemeriksaan	175,67 %	Sangat berhasil
	Program Pengendalian Pajak Daerah	Persentase Realisasi pembayaran tagihan Pajak Daerah	96,87	Berhasil
	Evaluasi Dan Pelaporan Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Yang Disusun tepat waktu	100 %	Berhasil
		Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Penerimaan Pajak Daerah tepat waktu	100 %	Berhasil
	Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Jumlah pembayaran tunggakan pajak daerah	105 %	Sangat berhasil
		Persentase wp yang membayar pajak melalui operasi sisir	-	

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	% Capaian	Kategori
	Penindakan obyek pajak dan wajib pajak.	Jumlah penindakan yang dilaksanakan	100 %	Berhasil
		Jumlah koordinasi yang di laksanakan dengan instansi terkait	100 %	Berhasil
		Jumlah operasi sisir reklame tetap dan insidental yang dilaksanakan	100 %	Berhasil

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

a) Dasar Hukum

Dalam rangka perwujudan good governance Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, maka tugas dan tanggung jawab perangkat daerah di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo dituntut untuk mewujudkan kemampuan dalam mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dalam rangka memenuhi tuntutan tersebut diperlukan pengembangan dan penataan sistem serta prosedur kerja yang cepat, tepat, jelas dan nyata serta dapat dipertanggungjawabkan, sehingga penyelenggaraan tugas pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Untuk itu diperlukan laporan kinerja perangkat daerah dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun dengan mempedomani ketentuan sebagai berikut;

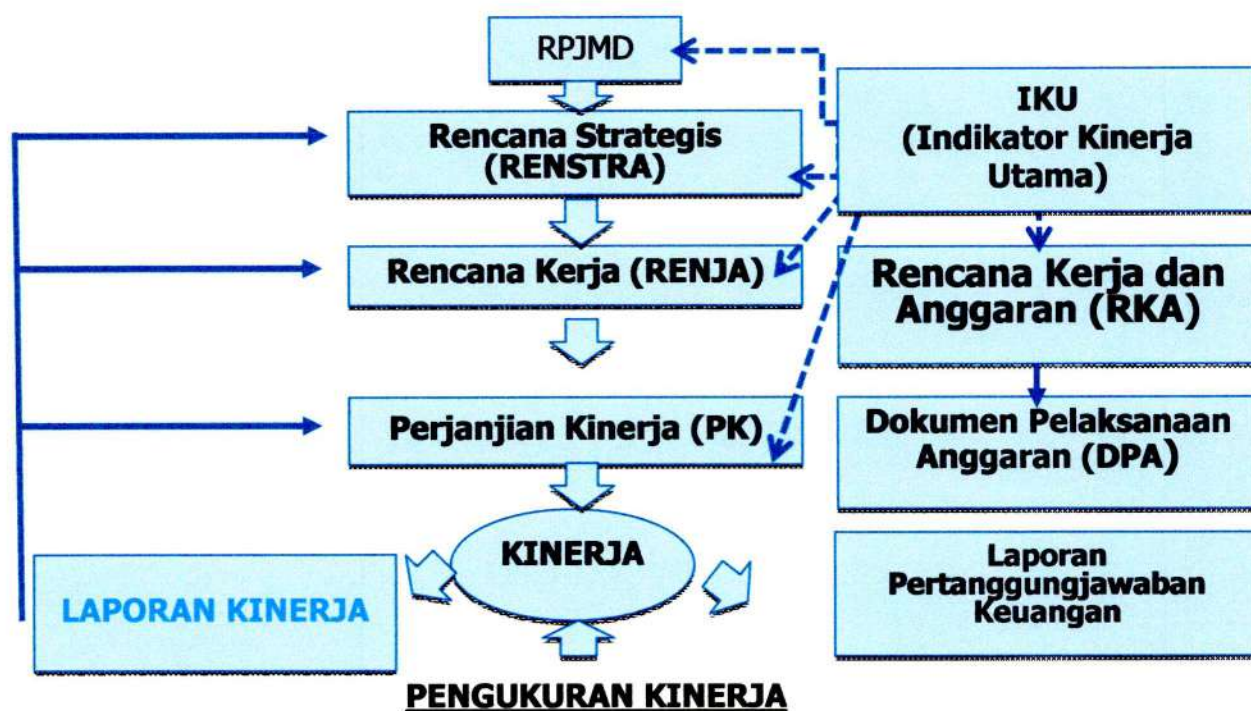
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

b) Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) adalah mewujudkan transparansi, akuntabilitas dan kinerja aparatur dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Bidang Keuangan khususnya sektor Pajak Daerah. Untuk itu Laporan Kinerja yang di dalamnya berisi konstelasi perencanaan strategis dan implementasinya serta tolak ukur keberhasilan berbagai indikator yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk itu tujuan dari semua itu adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja organisasi;
2. Hasil evaluasi berupa kritik maupun saran sangat diharapkan untuk menjadi bahan acuan perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi pada tahun selanjutnya serta masa yang akan datang;
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada organisasi dengan menerapkan azas transparansi, sistematis dan akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan).

Dengan demikian Laporan Kinerja Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2020 ini merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan antara RPJMD Kabupaten Sidoarjo dengan Renstra Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana bagan berikut :

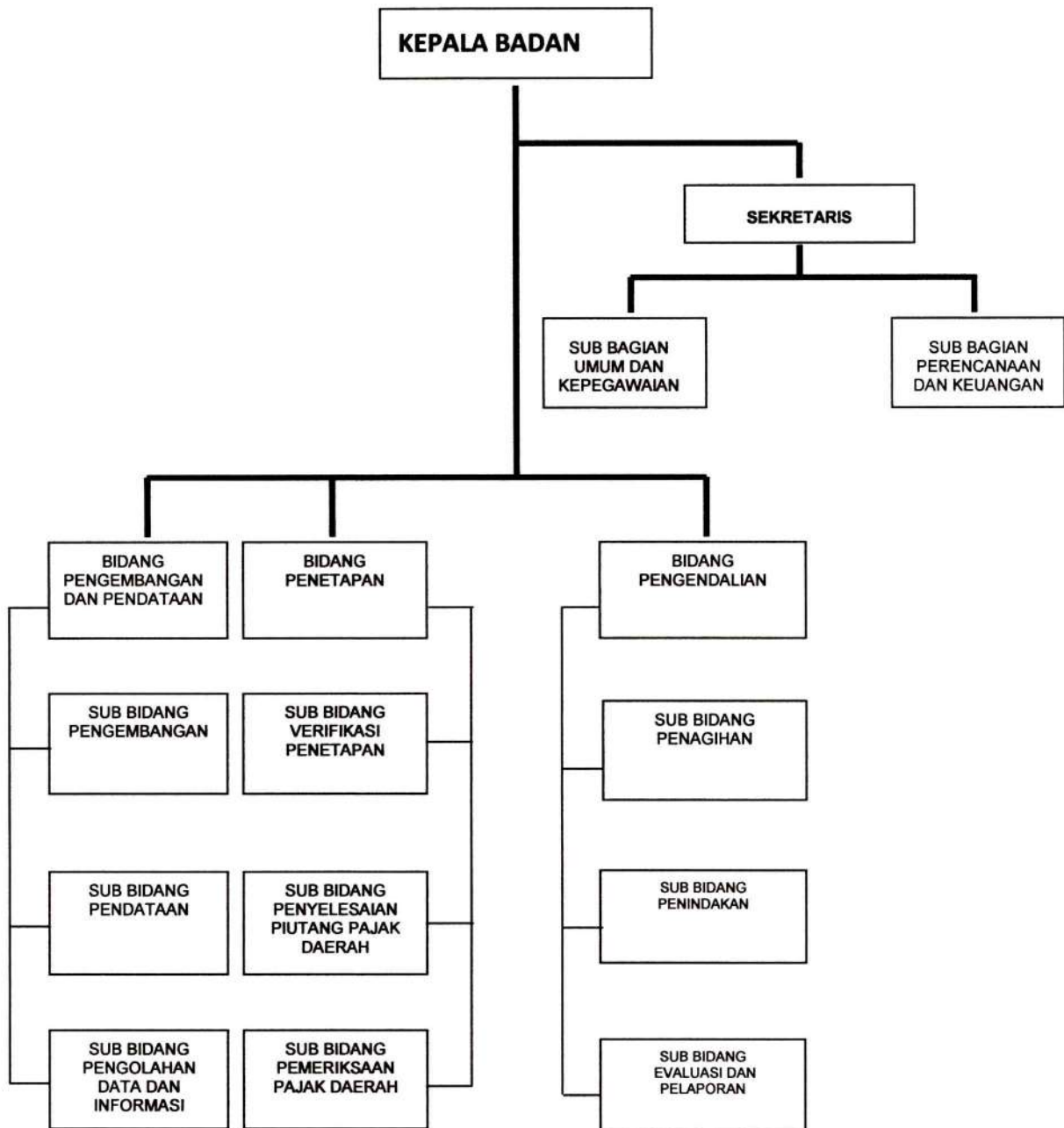


1.2. Gambaran Umum OPD

a) Struktur Organisasi

Mempedomani Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo, maka struktur organisasi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :

**Struktur Organisasi
Badan Pelayanan Pajak Daerah**



b) Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan mempedomani Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Tugas pokok tersebut adalah membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan dalam pelayanan pajak daerah.

Adapun fungsinya adalah;

- a. Penyusunan kebijakan teknis pelayanan pajak daerah;
- b. Pelaksanaan tugas pelayanan pajak daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan pajak daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan bidang pelayanan pajak daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo terdiri dari Kepala Badan (satu) Sekretariat dengan 2 (dua) Sub Bagian, 3 (tiga) Bidang dengan 9 (sembilan) Sub Bidang, adapun untuk tugas dan fungsi masing-masing sebagai berikut;

1. Kepala Badan

Tugas Kepala Badan adalah memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Badan Pelayanan Pajak Daerah.

Sedangkan untuk fungsi Kepala Badan adalah sebagai berikut;

- a. Perencanaan program pelayanan pajak daerah serta kesekretariatan;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas badan ;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas badan;
- d. Pembinaan pelaksanaan tugas bawahan ;
- e. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati;

- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

2. Sekretariat

Tugas Sekretariat adalah melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan.

Untuk fungsi Sekretariat adalah sebagai berikut:

- a. pengoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaporan;
- b. pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugasnya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian, yaitu;

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Tugas masing-masing Sub Bagian dimaksud adalah sebagai berikut:

- (1) Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - a. melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan dan dokumentasi;
 - b. melaksanakan pengelolaan sarana prasarana;
 - c. menerima dan mengkoordinasikan tindak lanjut pelayanan dan pengaduan masyarakat;
 - d. melaksanakan pembinaan dan administrasi kepegawaian;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.
- (2) Tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - a. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan program;
 - b. menyusun laporan kinerja badan;

- c. menyusun rencana kebutuhan anggaran;
- d. melaksanakan administrasi keuangan;
- e. melaksanakan laporan pengelolaan keuangan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

3. Bidang Pengembangan dan Pendataan

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pelayanan Pajak Daerah dalam Bidang Pengembangan dan Pendataan.

Rincian fungsi Bidang Pengembangan dan Pendataan, sebagaimana disebut di atas adalah sebagai berikut;

- a. penyusunan kebijakan teknis pengembangan, pendataan, pengolahan data dan informasi;
- b. pelaksanaan kebijakan pengembangan, pendataan, pengolahan data dan informasi;
- c. pelaporan pelaksanaan kegiatan pengembangan, pendataan, pengolahan data dan informasi;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugasnya.

Untuk Bidang Pengembangan dan Pendataan, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bidang yaitu;

- a. Sub Bidang Pengembangan,
- b. Sub Bidang Pendataan
- c. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi. Rincian tugas masing-masing

Sub Bidang dimaksud adalah sebagai berikut;

- (1) Sub Bidang Pengembangan mempunyai tugas sebagai berikut;
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan pajak daerah;

- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pengembangan pajak daerah, meliputi:
 - 1. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan strategi pengembangan pajak daerah;
 - 2. pelayanan mutasi subyek/ obyek pajak.
 - c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pengembangan pajak daerah;
 - d. melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- (2) Sub Bidang Pendataan mempunyai tugas sebagai berikut;
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pendataan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pendataan;
 - 1. penyuluhan pajak;
 - 2. pendataan, pendaftaran dan penilaian subyek/ obyek pajak baru.
 - c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pendataan;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- (3) Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas sebagai berikut;
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengolahan data dan informasi;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pengolahan data dan informasi, yang meliputi :
 - 1. perekaman dokumen pajak daerah;
 - 2. pengolahan dokumen pajak daerah;
 - 3. penyajian informasi pajak daerah;

4. pelaksanaan dan pemeliharaan aplikasi pelayanan pajak daerah.
 - c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pengolahan data dan informasi;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
4. Bidang Penetapan
- Mempunyai tugas melaksanakan tugas sebagian tugas Badan Pelayanan Pajak Daerah dalam Bidang Penetapan.
- Rincian fungsi Bidang Penetapan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut;
- a. penyusunan kebijakan teknis penetapan penyelesaian piutang dan pemeriksaan pajak;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis penetapan, penyelesaian piutang dan pemeriksaan;
 - c. pelaporan pelaksanaan kegiatan penetapan, penyelesaian piutang dan pemeriksaan;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugasnya.

Bidang Penetapan terdiri dari 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu;

- a. Sub Bidang Verifikasi Penetapan,
- b. Sub Bidang Penyelesaian Piutang Pajak Daerah,
- c. Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah.

Rincian tugas masing-masing Sub Bidang dimaksud adalah sebagai berikut;

- (1) Sub Bidang Verifikasi Penetapan mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis verifikasi penetapan;

- b. menyiapkan bahan pelaksanaan :
 - 1. verifikasi atas ketetapan perhitungan pajak daerah;
 - 2. penetapan besaran pajak daerah;
 - 3. tindak lanjut permohonan keberatan, pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi, pembetulan, dan pembatalan pajak daerah;
 - 4. pemeriksaan NPOP dengan tim pemeriksa;
 - c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis verifikasi penetapan;
 - d. melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- (2) Sub Bidang Penyelesaian Piutang Pajak Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyelesaian piutang;
 - b. menyiapkan bahan;
 - 1. data piutang dan penyisihan piutang pajak daerah;
 - 2. pelaksanaan identifikasi piutang pajak daerah;
 - 3. penyelesaian piutang pajak daerah sesuai hasil identifikasi;
 - c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis penyelesaian piutang;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- (3) Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemeriksaan pajak;
 - b. menyiapkan bahan;
 - c. kegiatan pemeriksaan dan tenaga pemeriksa pajak daerah;
 - d. tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan.

- e. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pemeriksaan pajak;
- f. menyiapkan bahan dan melakukan pemeriksaan NPOP dengan tim pemeriksa;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

5. Bidang Pengendalian

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pelayanan Pajak Daerah dalam Bidang Pengendalian daerah serta memonitoring penerimaan retribusi.

Rincian fungsi Bidang Pengendalian sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut :

- a. penyusunan kebijakan teknis penagihan, penindakan, evaluasi dan laporan pajak daerah serta memonitoring penerimaan retribusi daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis penagihan, penindakan, evaluasi dan laporan pajak daerah serta memonitoring penerimaan retribusi daerah;
- c. pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang penagihan, penindakan, evaluasi dan laporan pajak daerah serta memonitoring penerimaan retribusi;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugasnya.

Bidang Pengendalian terdiri dari 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu;

- a. Sub Bidang Penagihan,
- b. Sub Bidang Penindakan
- c. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.

Rincian fungsi masing-masing Sub Bidang dimaksud adalah sebagai berikut :

- (1) Sub Bidang Penagihan mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penagihan;

- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis penagihan, meliputi:
 - 1) penagihan aktif;
 - 2) tindaklanjut hasil penagihan;
 - 3) penyimpanan dokumen penagihan.
 - c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis penagihan;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- (2) Sub Bidang Penindakan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penindakan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis penindakan, meliputi:
 - 1. data obyek penindakan;
 - 2. penindakan meliputi : surat pemberitahuan, surat penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa, surat penyitaan;
 - 3. koordinasi dengan instansi terkait;
 - 4. tindaklanjut hasil penindakan.
 - c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis penindakan;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- (3) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis evaluasi dan pelaporan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis evaluasi dan pelaporan, meliputi :
 - 1. evaluasi realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - 2. rekonsiliasi data penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - 3. tindak lanjut hasil evaluasi atas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;

4. tindak lanjut permohonan legalisasi dan salinan SPPT PBB;
5. melaksanakan validasi SSPD;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis evaluasi dan pelaporan;
- d. melaksanakan tugas ketatausahaan Bidang;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

c) Aspek Strategis

Aspek strategis yang mendukung kinerja Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo, meliputi;

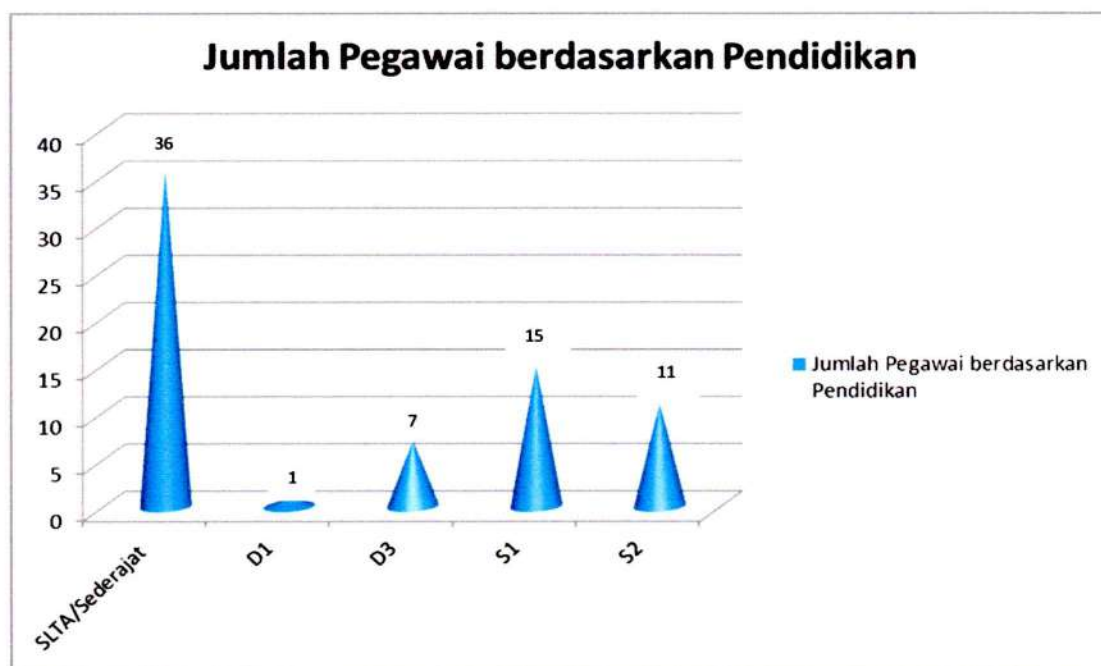
a. Sumber Daya Aparatur

Susunan kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo dapat dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan dan eselonering. Jumlah pegawai Badan Pelayanan Pajak Daerah sebanyak 91 personil yang terdiri dari 70 ASN dan 21 Non ASN. Berikut diagram Pegawai Badan Pelayanan Pajak Daerah menurut kualifikasi pendidikan dan golongannya (sumber data per Desember 2020) :

Data SDM Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Golongan

Jumlah Pegawai BPPD
PNS : 70 orang
Non PNS : 21 Orang

PPNS : 3 orang
Penilai PBB : 3 Orang
Pemeriksa Pajak : 22 Orang
Juru Sita Pajak : 6 Orang



b. Aset Yang Dimiliki

Sarana dan Prasarana yang dimiliki Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam rangka mendukung kegiatan organisasi meliputi :

a. Kantor (Gedung)

Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo terletak di Jl. Pahlawan No. 56 Kabupaten Sidoarjo di atas lahan seluas ± 6.350 M² dengan luas bangunan ± 1.317 M², sedangkan sisanya berupa taman, tempat parkir dan Gedung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo.

b. Sarana Kendaraan

Sarana kendaraan terdiri dari roda empat sebanyak 15 Unit dan roda dua sebanyak 73 Unit, seluruhnya dalam keadaan baik dan difungsikan untuk mendukung pelayanan tugas OPD. Frekuensi kegiatan operasional cenderung meningkat disaat ada kegiatan operasi-operasi terhadap penagihan Pajak Daerah, namun mobilitas kendaraan roda empat dan roda dua diperlukan perawatan yang ekstra agar laik jalan dan berhasil guna dalam memperlancar tugas-tugas OPD untuk mendukung peningkatan penerimaan Pajak Daerah.

c. Peralatan Elektronik

Peralatan elektronik (komputer, laptop, server dll) untuk memproses data dan kegiatan surat menyurat terdapat sebanyak 382 buah. Untuk beberapa unit komputer yang tersedia kondisinya masih baik, namun kapasitas dan performanya sudah ketinggalan, sehingga aplikasi/software program komputer yang terkini diperlukan kecepatan dan upgrade untuk mendukung kecepatan pemrosesan pelayanan OPD. Akan tetapi dengan adanya perawatan yang kontinue dan pengadaan komputer baru, diharapkan dapat menunjang fungsi operasionalnya. Sedangkan peralatan manual seperti mesin ketik dan alat perforasi masih difungsikan sebagai pendamping peralatan elektrik dalam mendukung kelancaran pelayanan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo.

c. Isu Strategis

Sebelum mengurai atas isu strategis, perlu kami jelaskan permasalahan kinerja pendapatan daerah atas penerimaan Pajak Daerah di Tahun 2020, bahwa adanya bencana non alam Pandemi Covid -19 sangat berdampak besar terhadap optimalisasi penerimaan pajak daerah. Permasalahan besar yang harus dihadapi masa Pandemi Covid -19 adalah turunnya tingkat perekonomian dan daya beli masyarakat, sehingga hal ini berpengaruh terhadap pencapaian kinerja penerimaan pajak daerah di antaranya adalah:

- 1) Banyaknya obyek pajak yang tutup/operasional
- 2) Banyaknya WP yang tidak membayar pajak dan mengajukan keringanan/penundaan pembayaran
- 3) Kebijakan pemerintah atas pembatasan sosial kemasyarakatan (PSBB/PPKM), misalnya pembatasan jam operasional usaha dan berkumpul masyarakat.
- 4) Kebijakan relaksasi pajak, sehingga mempengaruhi potensi penerimaan pajak daerah, misalnya relaksasi pembayaran listrik untuk pengguna tertentu.
- 5) Refocusing anggaran program kegiatan perangkat daerah yang dialihkan untuk penanganan Pandemi Covid – 19.

Permasalahan di atas tentu harus diantisipasi dengan langkah strategis organisasi, agar kinerja penerimaan pajak daerah dapat terealisasi dinatara dengan :

- 1) Pendataan kembali data potensi OPWP
- 2) Kebijakan untuk relaksasi pembayaran pajak daerah, baik penundaan pembayaran ataupun memberikan keringan atas pembayaran pajak tertentu
- 3) Penyesuaian target penerimaan pajak daerah yang disesuaikan dengan turunnya perekonomian dan daya beli masyarakat.
- 4) Optimalisasi penagihan aktif melalui pembayaran berbasis aplikasi/online.

Isu strategis dan permasalahan yang harus dihadapi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya akan bisa diminimalisir dengan identifikasi permasalahan yang didasarkan pada analisis permasalahan. Penilaian terhadap kondisi organisasi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo dilakukan dengan analisis atas permasalahan layanan dengan melibatkan seluruh stakeholders.

Beberapa permasalahan yang yang menjadi isu strategis dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Mekanisme Menghitung Pajak Sendiri (MPS) memungkinkan wajib pajak kurang terbuka, taat dan jujur dalam pelaporan omset usahanya, sehingga rawan terjadi kebocoran pajak.
- b. Tingginya beban kerja tidak sebanding dengan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada;
- c. Potensi Obyek Pajak Daerah masih belum tergali secara maksimal;
- d. Adanya sebagian wajib pajak yang kurang mentaati peraturan dalam membayar pajak.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

a. Keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD

Perencanaan strategis Badan Pelayanan Pajak Daerah yang berkaitan dengan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021, sebagai berikut;

**Keterkaitan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 dengan Renstra
Badan Pelayanan Pajak Daerah**

Misi RPJMD Kab. Sidoarjo	Tujuan RPJMD Kab. Sidoarjo	Sasaran RPJMD Kab. Sidoarjo	Tujuan Renstra OPD	Sasaran Renstra OPD
Misi 2 : Meningkatnya perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis Industri pengolahan, pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM dan Koperasi serta pemberdayaan masyarakat	Tujuan 2 :Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing	SASARAN RPJMD 3 : Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat	Terwujudnya Peningkatan PAD	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah dengan kualitas pelayanan pajak daerah yang prima

b. Matriks Rencana Strategis

Tujuan : Terwujudnya Peningkatan PAD

Indikator Kinerja Tujuan : (Rasio Penerimaan Pajak Daerah terhadap Penerimaan Asli Daerah, Target tahun 2020 sebesar 60 : 100)

NO	SASARAN STRATEGIS		DIFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN	TAHUN DASAR	TARGET TAHUNAN					STRATEGI PENCAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA			2016	2017	2018	2019	2020	2021	PROGRAM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah dengan kualitas pelayanan pajak daerah yang prima	<p>a. Nilai SKM terhadap layanan pajak daerah</p> <p>b. Prosentase keluhan WP yang diselesaikan sesuai waktu tanggap</p> <p>c. Prosentase peningkatan Penerimaan Pajak daerah</p> <p>d. Prosentase Realisasi Piutang</p>	<p>Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)</p> <p>(Jumlah keluhan yang selesai tepat waktu) / (Jumlah keluhan yang masuk) x 100%</p> <p>$P_j = \frac{n - (n-1)}{(n-1)} \times 100\%$</p> <p>Ket : Pj = Peningkatan Penerimaan Pajak n = Jumlah target penerimaan pajak daerah tahun Berjalan n-1 = Jumlah target penerimaan pajak daerah tahun Lalu</p> <p>$Piu = \frac{\text{Realisasi atas piutang tahun berjalan}}{\text{Ketetapan piutang tahun berjalan}} \times 100\%$</p> <p>Ket : Piu = persentase realisasi piutang</p>	68	75	76	77	80	81,5	Program pelayanan administrasi perkantoran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 5. Penyediaan jasa administrasi keuangan 6. Penyediaan jasa kebersihan kantor/keamanan kantor / pengemudi 7. Penyediaan alat tulis kantor 8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9. Penyediaan 	
				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %			
				6,3 %	7,01 %	7,01 %	7,05 %	-15,89 %	7,14 %			
				73,3 %	74,1 %	74,9 %	75,8 %	76,05 %	77,4 %			

NO	SASARAN STRATEGIS		DIFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN	TAHUN DASAR	TARGET TAHUNAN					STRATEGI PENCAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA			2016	2017	2018	2019	2020	2021	PROGRAM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										Program peningkatan sarana dan prasarana	n komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10. Penyediaan peralatan rumah tangga 11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 12. Penyediaan bahan logistik kantor 13. Penyediaan makanan dan minuman 14. Rapat-rapat koordinasi keluar daerah dan dalam daerah 1. Pengadaan meubeleurn 2. Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor 3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4. Pemeliharaan rutin berkala kendaraan operasional 5. Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor	
										Program peningkatan	1. Pengadaan pakaian	

NO	SASARAN STRATEGIS		DIFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN	TAHUN DASAR	TARGET TAHUNAN					STRATEGI PENCAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA			2016	2017	2018	2019	2020	2021	PROGRAM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										<p>n disiplin aparatur</p> <p>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</p> <p>Program Pelayanan Kesekretariatan</p>	<p>dinas beserta perlengkapannya</p> <p>2. Pengadaan dan pemeliharaan mesin absensi pegawai</p> <p>1. Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan</p> <p>1. Penyediaan barang/jasa perkantoran</p> <p>2. Kegiatan kedinasan dalam daerah, luar daerah dan luar negeri</p> <p>3. Pengelolaan dan penatalaksanaan barang milik daerah</p> <p>4. Pengadaan sarana dan prasarana aparatur</p> <p>5. Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur</p> <p>6. Pengadaan pakaian dinas dan kelengkapan aparatur</p> <p>7. Peningkatan kapasitas aparatur</p>	

NO	SASARAN STRATEGIS		DIFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN	TAHUN DASAR	TARGET TAHUNAN					STRATEGI PENCAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA			2016	2017	2018	2019	2020	2021	PROGRAM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										Program Pendataan, Peningkatan dan Pengembangan Pajak Daerah. Program Penetapan Pajak Daerah Program Pengendalian Pajak Daerah	8. Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, data dan informasi PD 9. Monitoring dan evaluasi pelaporan kinerja PD 10. Penyusunan laporan keuangan 1. Pengembangan dan Intensifikasi pajak daerah 2. Ekstensifikasi pajak daerah 3. Pengolahan data dan informasi pajak daerah 1. Verifikasi penetapan Pajak Daerah 2. Pelayanan Pajak Daerah 3. Penyelesaian piutang pajak daerah 4. Pemeriksaan pajak daerah 1. Pelaksanaan penagihan pajak daerah 2. Penindakan Obyek Pajak dan Wajib Pajak 3. Evaluasi dan Pelaporan	

NO	SASARAN STRATEGIS		DIFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN	TAHUN DASAR	TARGET TAHUNAN					STRATEGI PENCAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA			2016	2017	2018	2019	2020	2021	PROGRAM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											Penerimaan Pajak Daerah	

2.2 Rencana Kerja Tahunan Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS		Target 2020	PROGRAM		Target 2020	KEGIATAN		TARGET 2020	ANGGARAN
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Meningkatkannya penerimaan Pajak Daerah dengan kualitas pelayanan prima.	1) Nilai SKM terhadap layanan pajak daerah	80	Program pelayanan Kesekretariatan	Tingkat kepuasan aparatur PD terhadap pelayanan Kesekretariatan	90 %	Penyediaan barang/jasa perkantoran	Jumlah surat keluar masuk yang dikelola	8.500 surat	2.468.918.324,00
		2) Prosentase keluhan WP yang diselesaikan sesuai waktu tanggap	100%					Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar	80 Orang/Bulan	
		3) Prosentase peningkatan Penerimaan pajak daerah	-15,89 %					Jumlah BBM yang disediakan	3.500 Liter	
		4) Prosentase Realisasi Piutang	76,6%					Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya	15 Unit	
								Jumlah jamuan rapat/tamu yang disediakan	700 Kotak	
								Rekening listrik, air, telepon dan	12 Bulan	

NO	SASARAN STRATEGIS		Target 2020	PROGRAM		Target 2020	KEGIATAN		TARGET 2020	ANGGARAN
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								internet yang terbayar		
								Jumlah buku bahan bacaan dan koran yang tersedia	84 Buah	
								Jumlah komponen listrik /penerangan yang tersedia	776 Buah	
								Jumlah alat tulis kantor dan cetak penggandaan yang tersedia	7.206 Buah	
							Kegiatan kedinasan dalam daerah, luar daerah dan luar negeri	Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti	100%	175.757.980.00
							Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung / kantor / rumah dinas/jabatan yang diadakan	98 Unit	1.501.021.213.00
							Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah luas gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang dipelihara	2 Gedung	496.745.000.00
								Jumlah kendaraan dinas/operasi	17 Unit	

NO	SASARAN STRATEGIS		Target 2020	PROGRAM		Target 2020	KEGIATAN		TARGET 2020	ANGGARAN
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								onal yang dipelihara		
								Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang dipelihara	280 Unit	
							Pengadaan pakaian dinas dan kelengkapan aparatur	Jumlah pakaian dinas/kerja dan kelengkapan aparatur yang tersedia	-	-
								Jumlah pakaian hari-hari tertentu yang tersedia	-	
							Monitoring dan evaluasi pelaporan kinerja PD	Jumlah dokumen Monev PD yang disusun	4 dokumen	116.700.000.00
								Jumlah Dokumen SKM yang disusun	1 dokumen	
								Jumlah dokumen Laporan kinerja yang disusun	1 Laporan	
							Penyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan PD yang tersusun	1 Laporan	2.868.000.00

NO	SASARAN STRATEGIS		Target 2020	PROGRAM		Target 2020	KEGIATAN		TARGET 2020	ANGGARAN
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Program Pendataan, Peningkatan Dan Pengembangan Pajak Daerah	Pesentase Pertumbuhan Obyek Pajak Daerah	4 %	Pendataan Dan Ekstensifikasi Pajak Daerah	Jumlah obyek pajak yang dilakukan penilaian individu atas bangunan PBB	21 OP	277.594.900.00
								Jumlah obyek pajak dan WP baru yang didata	9.000 OP	
							Pengembangan Dan Intensifikasi Pajak Daerah	Jumlah obyek pajak yang dilakukan penilaian massal	804.000 NOP	1.273.700.000.00
							Pengolahan Data Dan Informasi Pajak Daerah	Jumlah data informasi yang diperbarui	3 informasi	496.760.000.00
								Jumlah dan jenis data pajak daerah yang diolah	9 jenis pajak	
				Program Penetapan Pajak Daerah	Persentase jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang sesuai ketentuan	83 %	Verifikasi penetapan pajak daerah	Jumlah verifikasi ketetapan pajak daerah	826.764 OP	1.863.850.700.00
								Jumlah surat pemberitah	831.636 OP	

NO	SASARAN STRATEGIS		Target 2020	PROGRAM		Target 2020	KEGIATAN		TARGET 2020	ANGGARAN
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								uan dan surat ketetapan yang disampaikan ke WP		
							Penyelesaian Piutang Pajak Daerah	Persentase jumlah tunggakan yang ada obyek pajaknya	61 %	180.504.200.00
								Persentase jumlah tunggakan yang tidak ada obyek pajaknya	1%	
							Pemeriksaan pajak daerah.	Jumlah WP yang dilakukan pemeriksaan	3.325 OP	20.320.000.00
				Program Pengendalian Pajak Daerah	Persentase Realisasi pembayaran tagihan Pajak Daerah	23 %	Evaluasi Dan Pelaporan Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Yang Disusun tepat waktu	12 Laporan	193.500.000.00
								Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Penerimaan Pajak Daerah tepat waktu	12 Laporan	
							Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Jumlah pembayara n	3.800 WP	617.789.350.00

NO	SASARAN STRATEGIS		Target 2020	PROGRAM		Target 2020	KEGIATAN		TARGET 2020	ANGGARAN
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								tunggakan pajak daerah		
								Persentase wp yang membayar pajak melalui operasi sisir	-	
							Penindakan obyek pajak dan wajib pajak.	Jumlah penindakan yang dilaksanakan	84 Kegiatan	207.665.500.00
								Jumlah koordinasi yang dilaksanakan dengan instansi terkait	54 Kegiatan	
								Jumlah operasi sisir reklame tetap dan insidental yang dilaksanakan	96 Kegiatan	

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja dilakukan bagi semua ASN di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo sudah dilakukan sesuai dengan target indikator masing-masing ASN. Untuk tahun 2020 ada review Renstra terkait penyesuaian target kinerja yang diakibatkan adanya Pandemi Covid-19, sehingga masing-masing pejabat dan ASN perlu dilakukan penyesuaian atas target kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun 2020.

Penyesuaian indikator kinerja khususnya terkait dengan Persentase peningkatan Penerimaan pajak daerah yang semula 7,09 menjadi -15,89 atas tahun sebelumnya.

Adapun uraian perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

1) Perjanjian Kinerja Kepala OPD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah dengan kualitas pelayanan pajak daerah yang prima	Nilai SKM terhadap layanan pajak daerah	80
		Prosentase keluhan WP yang diselesaikan sesuai waktu tanggap	-
		Prosentase peningkatan Penerimaan pajak daerah	-15,89 %
		Prosentase Realisasi Piutang	-

2) Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator / Eselon III

No.	PROGRAM	Indikator Program	Target Tahun 2020	Penganggung Jawab
1	Program Pelayanan Kesekretariatan	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	90 %	Sekretaris
2	Program Pendataan, Peningkatan Dan Pengembangan Pajak Daerah	Prosentase pertumbuhan Obyek Pajak Daerah	4 %	Kepala Bidang Pengembangan Dan Pendataan
3	Program Penetapan Pajak Daerah	Prosentase Jumlah Surat ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang sesuai ketentuan	83 %	Kepala Bidang Penetapan
4	Program Pengendalian Pajak Daerah	Prosentase realisasi pembayaran tagihan	23 %	Kepala Bidang

No.	PROGRAM	Indikator Program	Target Tahun 2020	Penganggung Jawab
		pajak daerah		Pengendalian

3) Perjanjian Kinerja Pejabat Pengawas / Eselon IV

No.	KEGIATAN	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2020	Penganggung Jawab
1	Penyediaan barang/jasa perkantoran	Jumlah surat keluar masuk yang dikelola	8.500 surat	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar	80 Orang/Bulan	
		Jumlah BBM yang disediakan	3.500 Liter	
		Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya	15 Unit	
		Jumlah jamuan rapat/tamu yang disediakan	700 Kotak	
		Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar	12 Bulan	
		Jumlah buku bahan bacaan dan koran yang tersedia	84 Buah	
		Jumlah komponen listrik /penerangan yang tersedia	776 Buah	
		Jumlah alat tulis kantor dan cetak penggandaan yang tersedia	7.206 Buah	
2	Kegiatan kedinasan dalam daerah, luar daerah dan luar negeri	Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti	100%	
3	Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang	98 Unit	

No.	KEGIATAN	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2020	Penganggung Jawab
		diadakan		
4	Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah luas gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang dipelihara	2 Gedung	
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	17 Unit	
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang dipelihara	280 Unit	
5	Pengadaan pakaian dinas dan kelengkapan aparatur	Jumlah pakaian dinas/kerja dan kelengkapan aparatur yang tersedia	-	
		Jumlah pakaian hari-hari tertentu yang tersedia	-	
6	Monitoring dan evaluasi pelaporan kinerja PD	Jumlah dokumen Monev PD yang disusun	4 dokumen	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
		Jumlah Dokumen SKM yang disusun	1 dokumen	
		Jumlah dokumen Laporan kinerja yang disusun	1 Laporan	
7	Penyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan PD yang tersusun	1 Laporan	
8	Pendataan dan Ekstensifikasi Pajak Daerah	Jumlah obyek pajak yang dilakukan penilaian individu atas bangunan PBB	21 OP	Kepala Sub Bidang Pendataan
		Jumlah obyek pajak dan WP baru yang didata	9.000 OP	
9	Pengembangan dan Intensifikasi Pajak Daerah	Jumlah Obyek Pajak yang dilakukan penilaian masal	804.000 NOP	Kepala Sub Bidang Pengembang

No.	KEGIATAN	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2020	Penganggung Jawab
				n
10	Pengolahan Data dan Informasi Pajak Daerah	Jumlah Sistem informasi yang diperbarui	3 sistem informasi	Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi
		Jenis pajak daerah yang di update	9 Jenis Pajak	
11	Pemeriksaan pajak daerah	Jumlah WP yang dilakukan pemeriksaan	3.325 OP	Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah
12	Penyelesaian Piutang Pajak Daerah	Prosentase jumlah piutang yang ada obyek pajaknya	61%	Kepala Sub Bidang Penyelesaian Piutang Pajak Daerah
		Prosentase jumlah piutang yang tidak ada obyek pajaknya	1%	
13	Verifikasi Penetapan Pajak	Jumlah verifikasi ketetapan pajak daerah	826.764 OP	Kepala Sub Bidang Verifikasi Penetapan
		Jumlah surat pemberitahuan dan surat ketetapan yang disampaikan ke WP	831.636 OP	
14	Evaluasi dan Pelaporan Penerimaan Pajak Daerah	a. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Yang Disusun tepat waktu	a. 12 Laporan	Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan
		b. Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Penerimaan Pajak Daerah tepat waktu	b. 12 Laporan	
15	Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Jumlah pembayaran tunggakan pajak daerah	3.800 WP	Kepala Sub Bidang Penagihan
		Prosentase WP yang membayar pajak melalui Operasi Sisir	-	

No.	KEGIATAN	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2020	Penganggung Jawab
16	Penindakan Obyek Pajak dan Wajib Pajak.	a. Jumlah penindakan yang dilaksanakan b. Jumlah koordinasi yang di laksanakan dengan instansi terkait c. Jumlah operasi sisir reklame tetap dan insidental yang dilaksanakan	a. 84 Kegiatan b. 54 Kegiatan c. 96 Kegiatan	Kepala Sub Bidang Penindakan

4) Anggaran Program / Kegiatan

No.	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran
A	Program Pelayanan Kesekretariatan	4.762.010.517,00
1	Penyediaan barang/jasa perkantoran	2.468.918.324,00
2	Kegiatan kedinasan dalam daerah, luar daerah dan luar negeri	175.757.980,00
3	Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	1.501.021.213,00
4	Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	496.745.000,00
5	Pengadaan pakaian dinas dan kelengkapan aparatur	-
6	Monitoring dan evaluasi pelaporan kinerja PD	116.700.000,00
7	Penyusunan laporan keuangan	2.868.000,00
B	Program Pendataan, Peningkatan dan Pengembangan Pajak Daerah.	2.048.054.900,00
1	pendataan dan Ekstensifikasi Pajak Daerah	277.594.900,00
2	Pengembangan dan Intensifikasi Pajak Daerah	1.273.700.000,00
3	Pengolahan Data dan Informasi Pajak Daerah	496.760.000,00
C	Program Penetapan Pajak Daerah.	2.064.674.900,00
1	Pemeriksaan pajak daerah.	20.320.000,00
2	Penyelesaian piutang pajak daerah	180.504.200,00
3	Verifikasi penetapan Pajak Daerah	1.863.850.700,00
D	Program Pengendalian Pajak Daerah	1.018.954.850,00
1	Evaluasi dan Pelaporan Penerimaan Pajak Daerah	193.500.000,00
2	Pelaksanaan penagihan pajak daerah	617.789.350,00
3	Penindakan Obyek Pajak dan Wajib Pajak.	207.665.500,00

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD

Berikut kami sajikan data capaian Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian Tahun 2020
1	Nilai SKM terhadap layanan pajak daerah	80	87,53	109,41%
2	Prosentase keluhan WP yang diselesaikan sesuai waktu tanggap	-	-	-
3	Prosentase peningkatan Penerimaan pajak daerah	-15,89%	109,40%	109,40%
4	Prosentase Realisasi Piutang	-	-	-

Catatan :

Dengan adanya Pandemi Covid-19, maka Target kinerja tahun 2020 telah dilakukan penyesuaian dalam Review Renstra tahun 2016-2021 menjadi sebesar **-15,89%**, hal ini karena atas ada penurunan atas penyesuaian target penerimaan Pajak Daerah dalam Renstra dari Tahun 2019 sebesar Rp. 1.009.946.880.000,00 menjadi Rp. 849.455.000.000,00 di tahun 2020. Namun pencapaian realisasi atas target dapat terpenuhi sebesar **109,40%** atau Rp. 929.261.529.986,45.

3.2 Capaian Kinerja Organisasi

a. Pengukuran Kinerja Jangka Menengah

Berikut kami sajikan data capaian Kinerja Jangka Menengah Badan Pelayanan Pajak Daerah sampai dengan Tahun 2020

No.	TUJUAN	Indikator Kinerja Tujuan	Target Tahun 2020	Realisasi di Tahun 2020	Capaian (%)
1	Terwujudnya Peningkatan PAD	Rasio Penerimaan Pajak Daerah terhadap Penerimaan Asli Daerah	60 : 100	51,35 : 100	85,58%

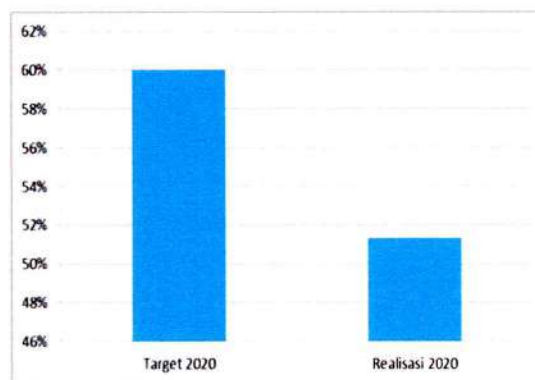
b. Analisis Pencapaian Kinerja Jangka Menengah
i. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target

No.	Indikator Kinerja Tujuan	Target s.d Tahun 2020	Realisasi s.d Tahun 2020	Capaian (%)
1	Rasio Penerimaan Pajak Daerah terhadap Penerimaan Asli Daerah	60 : 100	51,35 : 100	85,58%

Catatan :

Capaian tahun 2020 sebesar 85,58% namun Realisasi atas penerimaan pajak daerah dapat terpenuhi sebesar **109,40%**. Hal ini karena adanya Pandemi Covid-19, maka Target kinerja tahun 2020 telah dilakukan penyesuaian dalam Review Renstra tahun 2016-2021 menjadi sebesar **-15,89%** dengan perhitungan atas penyesuaian target penerimaan Pajak Daerah dalam Renstra dari Tahun 2019 sebesar Rp. 1.009.946.880.000,00 menjadi Rp. 849.455.000.000,00 di tahun 2020 dan realisasinya sebesar Rp. 929.261.529.986,45.

Grafik
Capaian Kinerja Tujuan

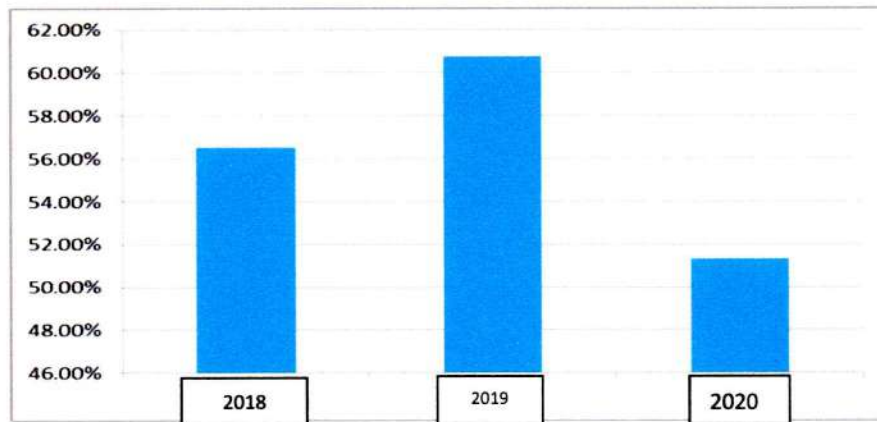


Berdasarkan tabel dan grafik tersebut, dapat disampaikan bahwa capaian kinerja telah mencapai 85,58 % dari target

ii. Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya

No.	Indikator Kinerja Tujuan	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020
1	Rasio Penerimaan Pajak Daerah terhadap Penerimaan Asli Daerah	56,56 : 100	60,78 : 100	51,35 : 100

Grafik
Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya



Berdasarkan tabel dan grafik tersebut, dapat disampaikan bahwa capaian kinerja tahun 2020 menurun dari tahun 2019 sebesar 9,43 %, penurunan dimaksud dikarenakan adanya refocusing akibat adanya Pandemi Covid-19.

c. Pengukuran Kinerja Tahunan

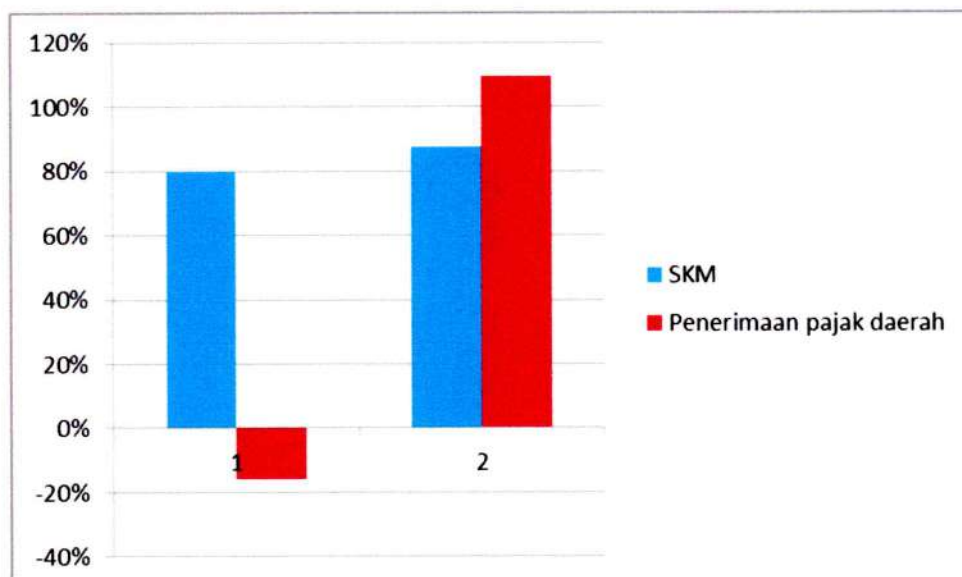
Berikut kami sajikan data capaian Kinerja Tahunan Badan Pelayanan Pajak Daerah sampai dengan Tahun 2020

No.	SASARAN	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian (%)
1	Meningkatkanya penerimaan Pajak Daerah dengan kualitas pelayanan prima	Nilai SKM terhadap layanan pajak daerah	80	87,53	109,41%
		Prosentase keluhan WP yang diselesaikan sesuai waktu tanggap	-	-	-
		Prosentase peningkatan Penerimaan pajak daerah	-15,89%	109,40%	109,40%
		Prosentase Realisasi Piutang	-	-	-

d. Analisis Pencapaian Kinerja Tahunan

i. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target

No.	SASARAN	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian (%)
1	Meningkatkannya penerimaan Pajak Daerah dengan kualitas pelayanan prima	Nilai SKM terhadap layanan pajak daerah	80	87,53	109,41%
		Prosentase keluhan WP yang diselesaikan sesuai waktu tanggap	-	-	-
		Prosentase peningkatan Penerimaan pajak daerah	-15,89%	109,40%	109,40%
		Prosentase Realisasi Piutang	-	-	-



- 1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo yang diperoleh melalui proses Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) atas pelayanan pajak mencapai angka **87,53** dengan

kategori mutu **BAIK**. Hal ini dikarenakan setiap tahun BPPD melakukan inovasi inovasi baru yang dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam pengajuan layanan pajak daerah;

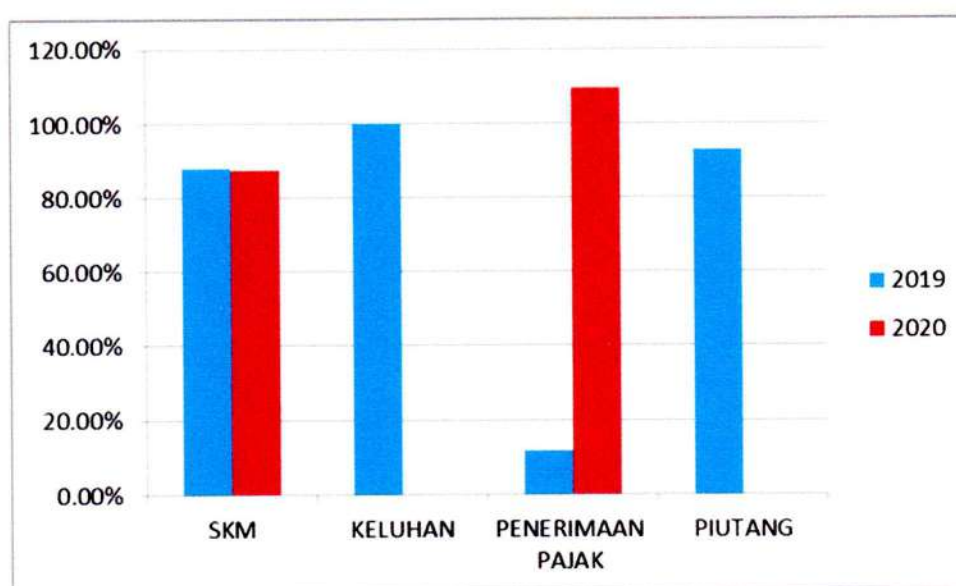
- 2) Pada Tahun 2020 terdapat 42 aduan/keluhan wajib pajak yang diterima oleh Badan Pelayanan Pajak daerah Kabupaten Sidoarjo melalui aplikasi lapor.go.id, website dan email resmi BPPD, serta kotak saran. seluruh Pengaduan tersebut telah ditanggapi sesuai dengan waktu tanggap yang telah ditentukan dalam standar pelayanan publik, dan sampai dengan akhir Tahun 2020 seluruh keluhan aduan telah diselesaikan
- 3) **Penerimaan pajak daerah** selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Data penerimaan pajak daerah sebagai berikut :

KETERANGAN	TAHUN			
	2017	2018	2019	2020
TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH	831,150,000,000.00	904,540,000,000.00	1,009,946,880,000.00	849,455,000,000.00
Peningkatan Target Pajak Daerah	144,330,000,000.00	73,390,000,000.00	105,406,880,000.00	(160.491.880.000,00)
Peningkatan Target Pajak Daerah (%)	21.01%	8.83%	11.65%	-15,89%
REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH	925,569,237,852.49	961,840,717,556.86	1,032,160,117,012.09	929,261,529,986.45
Peningkatan Realisasi Penerimaan Pajak	189.801.558.669.99	36,271,479,704.37	70,319,399,455.23	(102.898.587.025,64)
Peningkatan Realisasi Penerimaan Pajak (%)	25.80%	3.92%	7.31%	- 9,97 %

- 4) Realisasi piutang setiap tahun selalu mengalami kenaikan, hal ini telah didukung kegiatan pemutakhiran dan evaluasi data obyek PBB secara berkesinambungan. Namun demikian masih diperlukan regulasi yang pasti untuk menghapus piutang, khususnya terhadap data yang tidak valid dan perlu dilakukan penghapusan

ii. Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020
1	Nilai SKM terhadap layanan pajak daerah	87,93	87,53
2	Prosentase keluhan WP yang diselesaikan sesuai waktu tanggap	100 %	-
3	Prosentase peningkatan Penerimaan pajak daerah	11,65 %	109,40 %
4	Prosentase Realisasi Piutang	92,94 %	-



Berdasarkan tabel dan grafik tersebut, dapat disampaikan bahwa capaian kinerja tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 sebagai berikut :

- 1) Nilai Realisasi SKM terhadap layanan pajak daerah mengalami penurunan sebesar 0,40 %, dari nilai SKM Tahun 2019 sebesar 87,93 ke nilai SKM Tahun 2020 sebesar 87,53 namun berdasarkan kategori mutu pelayanan pajak daerah tetap mendapat kriteria **“BAIK”**

- 2) Persentase peningkatan Penerimaan pajak daerah mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020 sebesar -15,89%, hal ini dikarena adanya refocusing anggaran dan harus dilakukan penyesuaian target penerimaan pajak daerah tahun 2020.

iii. **Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah**

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian (%)
1	Nilai SKM terhadap layanan pajak daerah	80	87,53	109.41 %
2	Prosentase keluhan WP yang diselesaikan sesuai waktu tanggap	-	-	-
3	Prosentase peningkatan Penerimaan pajak daerah	- 15.89%	109,40%	109,40%
4	Prosentase Realisasi Piutang	-	-	-

IV. **Perbandingan antara capaian kinerja dengan instansi sejenis.**

Perbandingan capaian kinerja dengan instansi sejenis dengan BPPKAD Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut :

Capaian Kinerja BPPKAD Kabupaten Gresik

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		
				2018	2019	2020
1	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Realisasi Pendapatan Daerah	100%	100,18%	103,77%	102,97%

Capaian Kinerja BPPD Kabupaten Sidoarjo

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		
				2018	2019	2020
1	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah dengan kualitas pelayanan pajak daerah yang prima	Prosentase peningkatan Penerimaan pajak daerah	100%	106,33 %	102,20%	109,40 %

Dari perbandingan realisasi Indikator Kinerja Utama dengan instansi sejenis, maka rata-rata capaian BPPD Kabupaten Sidoarjo masih tinggi.

3.3 Evaluasi dan Analisis Kinerja

a. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Pengukuran Keberhasilan Kinerja Jangka Menengah OPD

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	% Capaian	Kategori	Penanggung Jawab
1.	Terwujudnya Peningkatan PAD	Rasio Penerimaan Pajak Daerah terhadap Penerimaan Asli Daerah	85,58%	Cukup	Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo

Keterangan :

No.	% CAPAIAN	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat berhasil
2	90% s.d kurang dari 100%	Berhasil
3	75% s.d kurang dari 90%	Cukup
4	Kurang dari 75%	Kurang

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Setelah dilakukan evaluasi dan analisis kinerja, selanjutnya dilakukan analisa terhadap keberhasilan dan kegagalan, yang meliputi penjelasan dalam menghadapi permasalahan – permasalahan pencapaian kinerja, beserta upaya – upaya yang dilakukan, serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya

➤ **TUJUAN 1 : Terwujudnya Peningkatan PAD**

- 1) Kendala / Permasalahan yang dihadapi :
 - Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih belum optimal.
 - Validasi data potensi Pajak Daerah perlu di update.
 - Terkait penghapusan piutang.
- 2) Upaya yang telah dilakukan :
 - Optimalisasi sosialisasi, baik langsung ke WP ataupun melalui media elektronik dan cetak
 - Update data melalui optimalisasi pendataan ulang
 - Koordinasi dengan instansi vertikal untuk penghapusan piutang (BPKP, BPK, Kementerian Dalam Negeri).
- 3) Rencana Tindak lanjut tahun berikutnya :
 - Peningkatan kegiatan sosialisasi dan pemberian penghargaan dan insentif perpajakan pada WP
 - Peningkatan wilayah data potensi untuk update data potensi
 - Koordinasi dengan kementerian terkait regulasi atas kepastian penghapusan piutang
- 4) Simpulan atas pencapaian kinerja :
 - Meningkatkan penerimaan PD
 - Meningkatkan validasi data OP untuk mendukung peningkatan penerimaan PD
 - Berkurangnya piutang.

Pengukuran Keberhasilan Kinerja Tahunan OPD

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	% Capain	Kategori	Penanggung Jawab
1.	Meningkatkannya penerimaan Pajak Daerah dengan kualitas pelayanan prima	Nilai SKM terhadap layanan pajak daerah	109,41%	Sangat berhasil	Sekretaris
		Prosentase keluhan WP yang diselesaikan sesuai waktu tanggap	-		
		Prosentase peningkatan Penerimaan pajak daerah	109,40%	Sangat berhasil	Kepala Bidang
		Prosentase Realisasi Piutang	-		

Keterangan :

No.	% CAPAIAN	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat berhasil
2	90% s.d kurang dari 100%	Berhasil
3	75% s.d kurang dari 90%	Cukup
4	Kurang dari 75%	Kurang

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Setelah dilakukan evaluasi dan analisis kinerja, selanjutnya dilakukan analisa terhadap keberhasilan dan kegagalan, yang meliputi penjelasan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan pencapaian kinerja, beserta upaya-upaya yang dilakukan, serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya

➤ **SASARAN 1** : Meningkatnya penerimaan Pajak Daerah dengan kualitas pelayanan prima

1) Kendala / Permasalahan yang dihadapi :

- Data WP/OP masih ada yang belum valid yang berpengaruh terhadap ketetapan pajak tidak sesuai kondisi sebenarnya
- Jumlah SDM yang mempunyai kompetensi terkait perpajakan belum ideal
- Rendahnya kesadaran WP untuk membayar pajak
- Rendahnya kesadaran WP untuk melaporkan data omset usaha dan beban karena masih beranggapan besaran nilai pajak masih tinggi.

- Data piutang yang belum optimal penghapusannya

2) Upaya yang telah dilakukan :

- Pendataan berkala untuk update data potensi
- Agar segera dilakukan penagihan pelaporan dan pembayaran SPTPD
- Memberdayakan jumlah SDM yang berkompeten
- Sosialisasi dan pemantauan langsung ke lapangan/OP
- Pelayanan pembayaran pajak secara on line
- Menyelenggarakan kegiatan penghapusan sanksi administratif pajak daerah
- Koordinasi untuk penghapusan dengan penghapusan secara bertahap

3) Rencana Tindak lanjut tahun berikutnya :

- Melaksanakan dan melakukan evaluasi atas kegiatan pemutakhiran basis data dan tinjau lapang secara efektif;
- Mengusulkan SDM untuk mengikuti kediklatan perpajakan
- Optimalisasi penagihan dan penindakan pajak daerah;
- Sosialisasi pajak daerah secara intensif
- Optimalisasi pemeriksaan pajak secara intensif dan penghapusan piutang.

4) Simpulan atas pencapaian kinerja :

- Terselenggaranya pelayanan prima
- Terpenuhinya jumlah SDM perpajakan sebanding dengan kuantitas OP
- Tercapainya penerimaan Pajak Daerah
- Meningkatkan validasi data OP untuk mendukung peningkatan penerimaan PD
 - Berkurangnya piutang.

b. Solusi dan upaya perbaikan di tahun mendatang

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisa terhadap capaian kinerja tersebut, maka terdapat catatan dan rekomendasi yang menjadi solusi dan upaya untuk perbaikan dan peningkatan di tahun mendatang, antara lain :

1. Update dan validitas data OP secara berkala dengan kerjasama pihak akademisi
2. Peningkatan pelayanan secara on line dan pemantauan langsung ke OP
3. Pemberdayaan SDM yang kompeten bidang perpajakan
4. Koordinasi penghapusan piutang yang optimal
5. Sosialisasi langsung dan melalui media.

3.4 Analisis Pencapaian Program dan Kegiatan Pendukung

- SASARAN 1 : Meningkatkan penerimaan Pajak Daerah dengan kualitas pelayanan prima

No.	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program / Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Tingkat Keberhasilan
	Program pelayanan Kesekretariatan	Tingkat kepuasan aparatur PD terhadap pelayanan Kesekretariatan	90 %	90 %	100 %	Berhasil
	Penyediaan barang/jasa perkantoran	Jumlah surat keluar masuk yang dikelola	8.500 surat	11.180 Surat	131,53 %	Sangat berhasil
		Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar	80 Orang/Bulan	80 Orang/Bulan	100 %	Berhasil
		Jumlah BBM yang disediakan	3.500 L	3.500 L	100 %	berhasil
		Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya	15 Unit	16 Unit	106,67 %	Sangat berhasil
		Jumlah jamuan rapat/tamu yang disediakan	700 Kotak	365 Kotak	52.14 %	Kurang
		Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar	12 Bulan	12 Bulan	100 %	Berhasil
		Jumlah buku bahan bacaan dan koran yang tersedia	84 Buah	81 Buah	96,43 %	Berhasil
		Jumlah komponen listrik /penerangan yang tersedia	776 Buah	776 Buah	100 %	Berhasil
		Jumlah alat tulis kantor dan cetak penggandaan yang tersedia	7.206 Buah	7.206 Buah	100 %	Berhasil
	Kegiatan kedinasan dalam daerah, luar daerah dan luar negeri	Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	Berhasil

No.	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program / Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Tingkat Keberhasilan
	Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung / kantor / rumah dinas/jabatan yang diadakan	98 Unit	89 Unit	90,82 %	Berhasil
	Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah luas gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang dipelihara	2 Gedung	2 Gedung	100 %	Berhasil
		Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	17 Unit	26 Unit	152,94 %	Sangat Berhasil
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang dipelihara	280 Unit	326 Unit	116,43 %	Sangat Berhasil
	Pengadaan pakaian dinas dan kelengkapan aparatur	Jumlah pakaian dinas/kerja dan kelengkapan aparatur yang tersedia	-	-	-	-
		Jumlah pakaian hari-hari tertentu yang tersedia	-	-	-	-
	Monitoring dan evaluasi pelaporan kinerja PD	a. Jumlah dokumen Monev PD yang disusun	4 dok	4 dok	100 %	Berhasil
		Jumlah Dokumen SKM yang disusun	1 dokumen	1 laporan	100 %	berhasil
		Jumlah dokumen Laporan kinerja yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	100 %	berhasil
	Penyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan PD yang tersusun	1 Laporan	1 Laporan	100 %	berhasil
	Program Pendataan, Peningkatan Dan Pengembangan Pajak Daerah	Pesentase Pertumbuhan Obyek Pajak Daerah	4 %	4,78 %	119,5 %	Sangat berhasil
	Pendataan Dan Ekstensifikasi Pajak Daerah	Jumlah obyek pajak yang dilakukan penilaian individu atas bangunan PBB	21 OP	21 OP	100 %	Berhasil
		Jumlah obyek pajak dan WP baru yang didata	9.000 OP	10.595 OP	117,72 %	Sangat berhasil
	Pengembangan Dan Intensifikasi Pajak	Jumlah obyek pajak yang dilakukan penilaian massal	804.000 NOP	798.390 NOP	99,3 %	Berhasil

No.	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program / Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Tingkat Keberhasilan
	Daerah					
	Pengolahan Data Dan Informasi Pajak Daerah	Jumlah data informasi yang diperbarui	3 informasi	3 informasi	100 %	Berhasil
		Jumlah dan jenis data pajak daerah yang diolah	9 jenis pajak	9 jenis pajak	100 %	Berhasil
	Program Penetapan Pajak Daerah	Persentase jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang sesuai ketentuan	83 %	102,45 %	123,44 %	Sangat berhasil
	Verifikasi penetapan pajak daerah	Jumlah verifikasi ketetapan pajak daerah	826.764 OP	842.750 OP	101,93 %	Sangat berhasil
		Jumlah surat pemberitahuan dan surat ketetapan yang disampaikan ke WP	831.636 OP	839.973 OP	101,00 %	Sangat berhasil
	Penyelesaian Piutang Pajak Daerah	Persentase jumlah tunggakan yang ada obyek pajaknya	61 %	62,90 %	125,62 %	Sangat berhasil
		Persentase jumlah tunggakan yang tidak ada obyek pajaknya	1 %	1,19 %	119,88 %	Sangat berhasil
	Pemeriksaan pajak daerah.	Jumlah WP yang dilakukan pemeriksaan	3.325 OP	5.841 OP	175,67 %	Sangat berhasil
	Program Pengendalian Pajak Daerah	Persentase Realisasi pembayaran tagihan Pajak Daerah	23 %	22,28 %	96,87 %	Berhasil
	Evaluasi Dan Pelaporan Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Yang Disusun tepat waktu	12 Laporan	12 Laporan	100 %	Berhasil
		Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Penerimaan Pajak Daerah tepat waktu	12 Laporan	12 Laporan	100 %	Berhasil
	Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Jumlah pembayaran tunggakan pajak daerah	3.800 WP	3.990 WP	105 %	Sangat berhasil
		Persentase wp yang membayar pajak melalui operasi sisir	-	-	-	

No.	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program / Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Tingkat Keberhasilan
	Penindakan obyek pajak dan wajib pajak.	Jumlah penindakan yang dilaksanakan	84 Kegiatan	84 Kegiatan	100 %	Berhasil
		Jumlah koordinasi yang dilaksanakan dengan instansi terkait	54 Kegiatan	54 Kegiatan	100 %	Berhasil
		Jumlah operasi sisir reklame tetap dan insidental yang dilaksanakan	96 Kegiatan	96 Kegiatan	100 %	Berhasil

Keterangan :

No.	% CAPAIAN	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat berhasil
2	90% s.d kurang dari 100%	Berhasil
3	75% s.d kurang dari 90%	Cukup
4	Kurang dari 75%	Kurang

Beberapa indikator kinerja terealisasi kurang dari 100 % terutama pada kesekretariatan, hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran terkait proses pengadaan barang jasa disesuaikan dengan kebutuhan.

3.5 Laporan Realisasi Anggaran

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Program Pelayanan Kesekretariatan	4,762,010,517.00	4,393,266,733.00	92.26
Penyediaan barang/jasa perkantoran	2,468,918,324.00	2,269,754,963.00	91.93
Kegiatan kedinasan dalam daerah, luar daerah dan luar negeri	175,757,980.00	175,223,777.00	99.70
Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	1,501,021,213.00	1,349,240,643.00	89.89
Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	496,745,000.00	486,110,600.00	97.86
Pengadaan pakaian dinas dan kelengkapan aparatur	0.00	0.00	-
Monitoring dan evaluasi pelaporan kinerja PD	116,700,000.00	110,565,000.00	94.74
Penyusunan laporan keuangan	2,868,000.00	2,371,750.00	82.70
Jumlah	4,762,010,517.00	4,393,266,733.00	92.26
Program Pendataan, Peningkatan dan Pengembangan Pajak Daerah.	2,048,054,900.00	1,821,406,900.00	88.93
pendataan dan Ekstensifikasi Pajak Daerah	277,594,900.00	236,210,400.00	85.09
Pengembangan dan Intensifikasi Pajak Daerah	1,273,700,000.00	1,189,295,000.00	93.37
Pengolahan Data dan Informasi Pajak Daerah	496,760,000.00	395,901,500.00	79.70
Jumlah	2,048,054,900.00	1,821,406,900.00	88.93
Program Penetapan Pajak Daerah.	2,064,674,900.00	1,874,912,033.00	90.81
Pemeriksaan pajak daerah.	20,320,000.00	15,785,800.00	77.69
Penyelesaian piutang pajak daerah	180,504,200.00	171,499,822.00	95.01
Verifikasi penetapan Pajak Daerah	1,863,850,700.00	1,687,626,411.00	90.55
Jumlah	2,064,674,900.00	1,874,912,033.00	90.81
Program Pengendalian Pajak Daerah	1,018,954,850.00	823,582,368.00	80.83
Evaluasi dan Pelaporan Penerimaan Pajak Daerah	193,500,000.00	134,988,500.00	69.76
Pelaksanaan penagihan pajak daerah	617,789,350.00	506,959,118.00	82.06
Penindakan Obyek Pajak dan Wajib Pajak.	207,665,500.00	181,634,750.00	87.47
Jumlah	1,018,954,850.00	823,582,368.00	80.83

3.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatkannya penerimaan Pajak Daerah dengan kualitas pelayanan prima	Nilai SKM terhadap layanan pajak daerah	80	87,53	109,41 %	-	-	-
	Prosentase keluhan WP yang diselesaikan sesuai waktu tanggap	-	-	-	4.762.010.517,00	4.393.266.733,00	92.26%
	Prosentase peningkatan Penerimaan pajak daerah	-15,89%	109,40 %	109,40 %	2.048.054.900,00	1.821.406.900,00	88.93%
	Prosentase Realisasi Piutang	-	-	-	3.083.629.750,00	2.698.494.401,00	87.51%

3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Efektivitas dan Efisiensi

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	% TINGKAT EFISIENSI
Meningkatkannya penerimaan Pajak Daerah dengan kualitas pelayanan prima	Nilai SKM terhadap layanan pajak daerah	109,41 %	-	109,41 %
	Prosentase keluhan WP yang diselesaikan sesuai waktu tanggap	-	92.26%	92.26 %
	Prosentase peningkatan Penerimaan pajak daerah	109,40 %	88.93%	20,47 %
	Prosentase Realisasi Piutang	-	87.51%	87.51%

Catatan : Tingkat Efisiensi = % Capaian Kinerja – % Penyerapan Anggaran

2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

- SASARAN 1 : Meningkatkan penerimaan Pajak Daerah dengan kualitas pelayanan prima

Berdasarkan pengukuran efektivitas dan efisiensi tersebut, dapat disampaikan bahwa terdapat 4 indikator kinerja yang efektif tercapai 100%, dan 4 indikator kinerja yang efisien dalam penggunaan anggaran.

Efisiensi anggaran dimaksud dikarenakan dalam proses pengadaan barang dan jasa pada kegiatan di masing-masing bidang disesuaikan dengan harga pasar yang berlaku.

**BAB IV
PENUTUP**

Laporan Kinerja Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja yang telah ditetapkan sesuai sesuai Indikator Kinerja Utama. Harapan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Dalam menjalankan tugas pokoknya adalah untuk membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di Bidang Keuangan dalam pelayanan Pajak Daerah.

Terhadap capaian kinerja dalam Laporan Kinerja Tahun 2020 telah dilakukan penyesuaian atas capaian target kinerja melalui Review Renstra, sehingga capaian di tahun 2020 dapat terpenuhi. Untuk itu tetap memerlukan peran serta dan komitmen bersama untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang dengan capaian yang lebih baik.

Sidoarjo, 22 Maret 2021

A.n. KEPALA BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO
SEKRETARIS


Drs. AHADI YUSUF, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19650912 199302 1 001